



2021-2026 RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Renstra merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program perangkat daerah untuk mendukung visi dan misi kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*), setiap Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Strategis sebagai acuan dan pedoman dalam mewujudkan visi dan misi sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.

Renstra merupakan acuan dan pedoman dasar pembangunan yang ingin dicapai daerah berdasarkan visi dan misi serta program Perangkat Daerah. Renstra perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Belitung Timur ini merupakan pemecahan dari dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur. Penyusunan dan penetapan Renstra yang dinamis ini merupakan konsepsi strategis yang dimungkinkan untuk dievaluasi dan disempurnakan selama rentang waktu pelaksanaannya, khususnya apabila dihadapkan kepada situasi dan kondisi serta dinamika perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang berada di luar kendali Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Belitung Timur.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Belitung Timur walaupun bentuknya masih jauh dari yang diharapkan, namun demikian Renstra ini kiranya dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang akan dicapai.

Manggar, September 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dan Perdagangan
Kabupaten Belitung Timur,



HARLI AGUSTA, ST
NIP. 19750821 200212 1 005



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
Bab I Pendahuluan.....	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Dasar Hukum.....	I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I - 4
1.4. Sistematika Penulisan.....	I - 5
Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II - 1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II - 1
2.1.1. Tugas.....	II - 1
2.1.2. Fungsi.....	II - 1
2.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II - 2
2.1.4. Tata Laksana Perangkat Daerah.....	II - 3
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II - 4
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	II - 4
2.2.2. Sumber Daya Aset/Modal (Sarana dan Prasarana).....	II - 8
2.3. Kinerja Pelayanan.....	II - 14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II - 23
Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....	III - 1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	III - 1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III - 2
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.....	III - 3
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.....	III - 3
3.3.2. Telaahan Renstra Provinsi.....	III - 5
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis....	III - 6
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruag Wilayah.....	III - 6
3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III - 7
3.5. Isu-Isu Strategis.....	III - 8
Bab IV. Tujuan dan Sasaran.....	IV - 1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur	IV - 1
Bab V . Strategi dan Arah Kebijakan.....	IV - 1
Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	VI - 1
Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	VII - 1
Bab VIII. Penutup.....	VIII - 1

Lampiran



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer serta Kualitas SDM per 31 Maret Tahun 2023 DPMPTSP Kab.Belitung Timur.....	II - 4
Tabel 2.2	Jumlah Esselon dan Kebutuhan Jabatan pada DPMPTSP Kab.Belitung Timur per 31 Maret Tahun 2023.....	II - 5
Tabel 2.3	Keadaan Pegawai pada DPMPTSP Kab.Belitung Timur per 31 Maret Tahun 2023.....	II - 6
Tabel 2.4	Pelatihan/Bimtek yang telah Diikuti Tahun 2018,2019,2020,2022 DPMPTSP Kab.Belitung Timur.....	II - 6
Tabel 2.5	Data Aset Tetap DPMPTSP Kab.Belitung Timur Berdasarkan Nilai per 31 Desember 2022.....	II - 8
Tabel 2.6	Data Aset Tetap DPMPTSP Kab.Belitung Timur per 31 Desember 2022.....	II - 8
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja DPMPTSP Kab.Belitung Timur.....	II - 15
Tabel 2.8	Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II - 21
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah.....	III - 1
Tabel 3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Periode 2021-2026.....	III - 2
Tabel 3.3	Telaahan Renstra DPMPTSP terhadap Kementerian dan Lembaga.....	III - 4
Tabel 3.4	Telaahan Renstra DPMPTSP terhadap Renstra Provinsi.....	III - 5
Tabel 3.5	Telaahan Renstra DPMPTSP Timur terhadap Tata Ruang wilayah.....	III - 7
Tabel 3.6	Telaahan terhadap KLHS.....	III - 7
Tabel 4.1	Target, Tujuan dan Sasaran Renstra.....	IV - 2
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	V - 1
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPMPTSP Kab.Belitung Timur Tahun 2021-2026.....	VI - 4
Tabel 6.2	Inovasi Daerah.....	VI - 22
Tabel 7.1	Indikator Kinerja DPMPTSP Kab.Belitung Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	VII - 2
Tabel 7.2	Definisi Operasional Indikator Kinerja DPMPTSP Kab.Belitung Timur.....	VIII - 2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Dokumen Renstra OPD dengan Dokumen Lainnya.....	I - 2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi DPMPTSP Kab.Belitung Timur.....	II - 3
Gambar 7.1	Sasaran Kinerja DPMPTSP Kab.Belitung Timur.....	VII - 1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah dengan target kinerja Perangkat Daerah yang disusun selama periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merujuk kepada Rancangan Awal RPJMD, diawali dengan cara mempelajari visi, misi dan program kepala daerah terpilih, mencari alur konsistensi antara RPJMD dengan Renstra. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Renstra Perangkat Daerah harus bersinergi dengan dokumen RPJMD sehingga Renstra Perangkat Daerah akan selaras dengan dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah. Tata cara penyusunan Renstra berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah:

1. Sebagai instrument perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi
2. Rencana Strategis memantapkan terlaksananya kegiatan prioritas sesuai dengan visi dan misi daerah melalui tujuan, sasaran program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
3. Rencana Strategis menyediakan ukuran keberhasilan kinerja birokrasi
4. Rencana Strategis meminimalisir perubahan rencana dan target kinerja Perangkat Daerah meskipun terdapat pergantian kepemimpinan.
5. Rencana Strategis menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja
6. Rencana Strategis wujud kontrak antara Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah

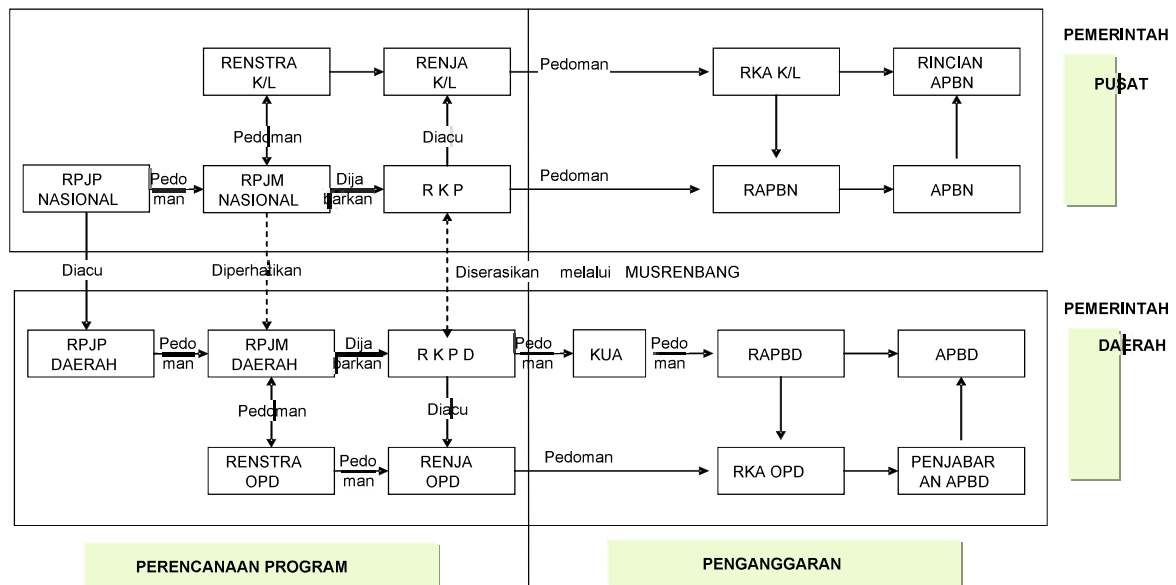
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur merupakan pemecahan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur yang semula mengampu urusan Penanaman modal, Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang



mengampu urusan perindustrian dan perdagangan dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengampu urusan penanaman modal. Berdasarkan hal tersebut disusunlah dokumen rencana strategis perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur tahun 2021-2026.

Hubungan antar dokumen perencanaan lainnya dengan Renstra mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Hubungan Dokumen Renstra OPD
dengan Dokumen Lainnya



1.2 LANDASAN HUKUM

Keberadaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP didasarkan atas produk-produk hukum yang berlaku saat ini, antara lain :

1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan , Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4268);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara , Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2011 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 95); dan
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 ini adalah untuk menyampaikan rancangan kegiatan strategis untuk 5 (lima) tahun serta sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur selama 5 (lima) Tahun dengan mengacu dan menyelaraskan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 yang meliputi :

- a) Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Belitung Timur;
- b) Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur;
- c) Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Kabupaten Belitung Timur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya;
- d) Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021- 2026 secara umum adalah bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi:



1. Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Belitung Timur;
2. Untuk memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Belitung Timur;
3. Mengarahkan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Belitung Timur pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama periode Renstra.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur ini terdiri dari beberapa bab dan dibuat dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab Ini Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab Ini Berisi Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab Ini Berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur merupakan pemecahan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur yang semula mengampu urusan Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengampu urusan perindustrian dan perdagangan dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengampu urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Tujuan pembentukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan Penanaman modal baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat dan menciptakan operasionalisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal secara terpadu. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, ditetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah susunan organisasi sebagai berikut :

2.1.1 TUGAS

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2.1.2 FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur memiliki fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;



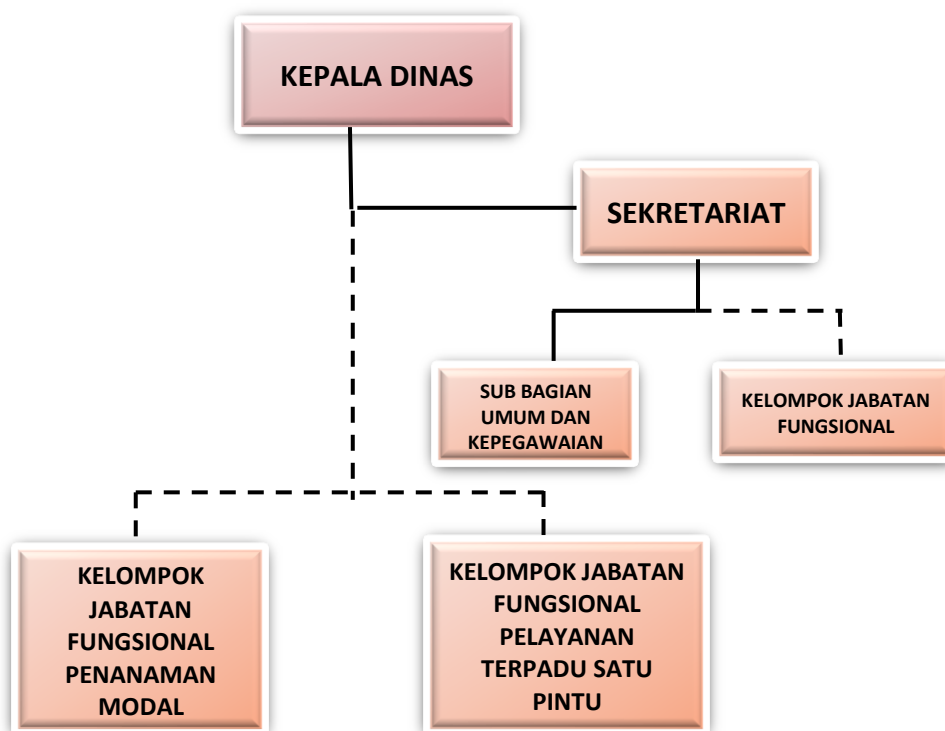
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil;
- f. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2.1.3 STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur mempunyai susunan organisasi sebagaimana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Peraturan Bupati Belitung Timur No.20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Berikut Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri atas;
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur



2.1.4 TATA LAKSANA PERANGKAT DAERAH

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Administrasi pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah. Standard Operating Procedures (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur sampai saat ini belum disusun dan masih berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur Nomor : 040 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan, yang terdiri dari :



1. Standar Operasional Prosedur Umum dan Kepegawaian sebanyak 11 SOP
2. Standar Operasional Prosedur Subbag Keuangan sebanyak 13 SOP
3. Standar Operasional Prosedur Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebanyak 12 SOP
4. Standar Operasional Prosedur Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal sebanyak 9 SOP
5. Standar Operasional Prosedur Pengendalian Informasi dan Dokumentasi sebanyak 12 SOP
6. Standar Operasional Prosedur Bidang Pelayanan Perizinan sebanyak 42 SOP
7. Standar Operasional Prosedur Perdagangan sebanyak 9 SOP
8. Standar Operasional Prosedur Perindustrian sebanyak 12 SOP
9. Standar Operasional UPT Pengelola Pasar sebanyak 4 SOP

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur sampai dengan 31 Maret 2023 didukung Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal, Bidang Pengendalian, Informasi, dan Dokumentasi, Bidang Pelayanan Perizinan dan Sekretariat yang saat ini ada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur. Jumlah Seluruh pegawai saat ini yang mendukung operasional Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur berjumlah 40 orang, terdiri dari 16 orang PNS dan 24 orang tenaga kontrak, terdiri dari :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer serta Kualitas SDM
per 31 Maret Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur

NO	KLASIFIKASI PEGAWAI	JUMLAH
A.	Pegawai Negeri Sipil	19 PNS
1.	Berdasarkan golongan/kebangkutan	
a	Golongan II	- Orang
b	Golongan III	16 Orang
c	Golongan IV	3 Orang
2.	Berdasarkan Eselon	
a	Eselon II	- Orang
b	Eselon III	4 Orang
c	Eselon IV	1 Orang

NO	KLASIFIKASI PEGAWAI	JUMLAH
	3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
	a Sekolah Dasar	-
	b Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	3 orang
	c Diploma 3	5 orang
	d Strata 1	11 orang
	e Strata 2	- orang
	1. Berdasarkan Jenis Kelamin	
	a Laki-laki	9 laki-laki
	b Perempuan	10 perempuan
B	Tenaga Kontrak	25 Orang
	1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
	a Sekolah Dasar	1 Orang
	b Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	16 Orang
	c Diploma 3	1 Orang
	d Strata 1	7 Orang
	e Strata 2	-
	2. Berdasarkan Jenis Kelamin	
	a Laki-laki	9 Laki-laki
	b Perempuan	16 Perempuan
	Jumlah Pegawai	44 Orang

Sumber Data : Bagian Kepegawaian DPMPTSP per 31 Maret Tahun 2023

Tabel 2.2
Jumlah Esselon dan Kebutuhan Jabatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur
per 31 Maret Tahun 2023

No	Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)			Keterangan
		Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	
1	Esselon II.b	1	-	1	kosong
2	Esselon III.a	1	1	-	
3	Esselon III.b	3	3	-	
4	Esselon IV.a	1	1	-	
5	Esselon IV.b	-	-	-	
6	Kelompok Jab. Fungsioanl/ jabatan lainnya	17	15	2	Pemenuhan sekretariat
	Jumlah	23	20	3	

Sumber Data : Bagian Kepegawaian DPMPTSP per 31 Maret Tahun 2023

Tabel 2.3
Keadaan Pegawai
Pada Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur
per 31 Maret Tahun 2023

No	Jabatan	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	Kepala Dinas	-	-	Kosong
2	Sekretaris	Pembina Tk.I /IV b	1 Orang	Pejabat Definitif
3	Kabid Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal	Penata Tk.I/III d	1 Orang	Pejabat Definitif
4	Kabid Pengendalian Informasi dan Dokumentasi	Pembina/IV a	1 Orang	Pejabat Definitif
5	Kabid Pelayanan Perizinan	Pembina/IV a	1 Orang	Pejabat Definitif
6	Kasubbag Bagian Umum dan Kepegawaian	Penata /III c	1 Orang	Pejabat Definitif
7	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Penata Tk.I/III d	1 Orang	
8	Perencana Ahli Muda	Penata Tk.I/III d	1 Orang	
9	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Penata Tk.I/III d	2 Orang	
10	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Penata/IIIc	1 Orang	
11	Pengelola Kerjasama dan Investasi	Penata Muda Tk.I/III b	1 Orang	
12	Pengelola Dokumentasi	Penata Muda Tk.I/III b	1 Orang	
13	Penata Perizinan	Penata Tk.I/III d	1 Orang	
14	Pengelola Dokumen Perizinan	Penata Tk.I/III d	1 Orang	
16	Analisis Kerjasama dan Permodalan	Penata Muda Tk.I/III b	1 Orang	
23	Bendahara	Penata Muda Tk.I/III b	1 Orang	
24	Pengadministrasi Keuangan	Penata/IIIc	1 Orang	
25	Pengadministrasi Umum	Penata Muda/III a	1 Orang	
27	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Penata Muda/III a	1 Orang	
29	Tenaga Kontrak	-	25 Orang	
Jumlah			44 Orang	

Sumber Data : Bagian Kepegawaian DPMPTSP per 31 Maret Tahun 2023

Tabel 2.4
Pelatihan/Bimtek Pegawai yang Telah diikuti Tahun 2018, 2019, 2020, 2022
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur

NO	PEGAWAI	JENIS PELATIHAN/BIMTEK	TAHUN PELAKSANAAN
URUSAN PENUNJANG LAINNYA			
1	Erliyanti, SE	Mengikuti Diklat Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Angkatan III Tahun 2018 di Jakarta	2018



NO	PEGAWAI	JENIS PELATIHAN/BIMTEK	TAHUN PELAKSANAAN
2	Susi Aprianti, A.Md	Mengikuti Pelatihan Perpajakan untuk Bendahara Pemerintah Daerah di MEP FEB UGM Yogyakarta	2019
3	Yayu Sulistia	Mengikuti Pelatihan Perpajakan untuk Bendahara Pemerintah Daerah di MEP FEB UGM Yogyakarta	2019
4	Erlianti, SE	Mengikuti Pelatihan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Daerah di MEP FEB UGM Yogyakarta	2019
5	Fahzil Josan	Mengikuti Sosialisasi LPPD di Yogyakarta	2020
6	Erlianti, SE	Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	2022
7	Fahzil Josan	Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	2022
URUSAN PENANAMAN MODAL			
8	Mardhia, S.Si	Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Kegiatan Pendampingan Implementasi Peraturan Daerah Bangunan Gedung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 di Pangkalpinang	2017
9	Mardhia, S.Si	Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Mengenai Sistem Berbasis Online Single Submission (OSS) ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta	2018
10	Budi Yuliansyah, SE	Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Mengenai Sistem Berbasis Online Single Submission (OSS) ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta	2018
11	Budi Yuliansyah, SE	Mengikuti Bimbingan Teknis PTSP Bidang PM Angkatan I	2018
12	Agus Helmi Mk, A.Md	Mengikuti Bimbingan Teknis PTSP Bidang PM Angkatan I	2018
13	Agus Helmi Mk, A.Md	Mengikuti Training Of Trainers (TOT) Aplikasi Perizinan online (Si Cantik)	2018
14	Mardhia, S.Si	Mengikuti Bimtek Penyelenggaraan PTSP di Lombok, Nusa Tenggara Barat	2018
15	Mardhia, S.Si	Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Penerapan Online Single Submission (OSS) di Jakarta	2018
16	Suciliswati, SE	Workshop Implementasi Disiplin dan Kode Etik ASN	2022
17	Erniati, S.AP	Pelatihan Training Of Trainer (TOT) Online Single Submission	2022

Sumber Data : Bagian Kepegawaian DPMPTSP per 31 Maret 2023

2.2.2 SUMBER DAYA ASET/MODAL (SARANA DAN PRASARANA)

Data Aset tetap berdasarkan data aset Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Tahun Anggaran 2022 berupa sarana dan prasarana gedung kantor beserta peralatannya, ditunjukkan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
DATA ASET TETAP DPMPTSP BERDASARKAN NILAI
Per 31 Desember 2022

ASET TETAP	31 Desember 2022 (Rupiah)
Tanah	10.443.559.200,00
Peralatan dan Mesin	6.095.747.911,00
Gedung dan Bangunan	39.349.796.934,66
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.884.484.905,99
Aset Tetap Lainnya	119.571.800,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	321.427.100,00
Akumulasi Penyusutan	(12.302.282.720,00)
Jumlah Aset Tetap	47.912.305.131,65

Sumber data : Laporan Keuangan DPMPTSP per 31 Desember 2022

Tabel 2.6
DATA ASET TETAP DPMPTSP
Per 31 Desember 2022

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
TANAH		
1	Tanah Bangunan Gedung Pameran	1
2	Tanah Bangunan Industri Bengkel	1
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4
4	Tanah Bangunan Pasar	8
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	2
6	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2
PERALATAN DAN MESIN		
	ALAT BESAR	
1	Pompa Air	4



NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
2	pompa lainnya (dst)	0
3	Pompa Tangan	3
4	Portable Generating Set	1
5	Portable Water Pump	10
6	Stationary Water Pump	1
	KOMPUTER	
1	Hard Disk	9
2	Hub	1
3	Lap Top	34
4	Local Area Network (LAN)	6
5	Note Book	2
6	P.C Unit	31
7	Peralatan Jaringan lainnya	14
8	peralatan mainframe lainnya (dst)	26
9	Peralatan Personal Komputer lainnya	5
10	Personal Komputer lainnya	1
11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44
12	Router	2
13	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	5
14	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3
15	Server	1
	ALAT KESELAMATAN KERJA	
1	Tenda	0
2	Alat Pemadam Kebakaran	1
	ALAT ANGKUTAN	
1	Gerobak Dorong	37
2	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3
4	Pick Up	1
5	Sepeda Motor	14
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1	Air Blower	0
2	alat timbangan/biara lainnya (dst)	0
3	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	18
4	Anak Timbangan Bidur	283
5	Ban Ukur	1
6	Bejana Ukur	5
7	Kaki Tiga Gantungan Dacin	1
8	Landasan Cap Lengkap	1
9	Mesin Kompresor	1



NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
10	Mesin Pengepres Kulit	1
11	Mesin Penghalus	2
12	perkakas konstruksi logam yang transportable (berpindah) lainnya (dst)	2
13	Scanner (Universal Tester)	0
14	Stopwatch	1
15	Tang Plombir / Segel	4
16	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	1
17	Timbangan Sentisimal Dacin Kuningan	9
18	Tool Set	2
19	Vernier Caliper	1
	ALAT PERTANIAN	
1	Rak-Rak Penyimpan	2
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1	A.C. Sentral	1
2	A.C. Split	37
3	Alat Dapur lainnya	5
4	Alat Kantor Lainnya	38
5	Alat Pemadam/Portable	2
6	Alat Penghancur Kertas	3
7	Alat Rumah Tangga Lain-lain	250
8	Bangku Tunggu	0
9	Brandkas	3
10	Camera film	0
11	Camera Video	4
12	CCTV - Camera Control Television System	5
13	Dispenser	12
14	Equalizer	1
15	Filing Cabinet Besi	45
16	Handy Cam	0
17	Jam Elektronik	0
18	Jam Listrik	0
19	Kipas Angin	15
20	Kompas Minyak	0
21	Kompas gas	1
21	Kontainer	2
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
23	Kursi Lipat	120
24	Kursi Putar	70
25	Kursi Tamu	9



NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
26	Lemari Besi/Metal	5
27	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3
28	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	2
29	Lemari Es	5
30	Lemari Kaca	14
31	Lemari Kayu	12
32	Loudspeaker	14
33	Meja 1/2 Biro	94
34	Meja Kerja Kayu	6
35	Meja Komputer	11
36	Meja Panjang	0
37	Meja Rapat	1
38	Meja Resepsionis	1
39	Meja Telepon	6
40	Mesin Absensi	3
41	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2
42	Mesin Hitung Manual	0
43	mesin ketik lainnya (dst)	0
44	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	1
45	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	2
46	Mesin Pemotong Rumput	3
47	Mesin Penghitung Uang	1
48	Meubeleur lainnya	32
49	Overhead Projector	2
50	Papan Pengumuman	4
51	Papan Tulis	0
52	Papan Visual/Papan Nama	2
53	Rak Besi	19
54	Rak Kayu	2
55	Rak Piring Alumunium	2
56	Sofa	5
57	Sound System	4
58	Tabung Gas	2
59	Tangga Aluminium	6
60	Televisi	6
61	Tiang Bendera	3
62	Tustel	0
63	White Board	20
64	Wireless	2
65	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	2



NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
66	Kursi Rapat	5
67	Stabilisator	0
68	Karpet	56
69	Meja Kerja Pejabat Lainnya(Meja Sidang)	1
70	Attachment	1
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
1	Audio Amplifier	1
2	Camera Electronic	2
3	Digital LED Running Text	1
4	Disc Record Player	0
5	Facsimile	0
6	GPS Receiver	1
7	Handy Talky (HT)	2
8	Mesin Jilid	1
9	Mesin Lipat	5
10	Microphone/Wireless MIC	1
11	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
1	alat kedokteran tht lainnya (dst)	0
2	Emergency Kit	4
	ALAT LABORATORIUM	
1	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	3
2	Alat Tenun Reeling	10
3	Gelas Ukur	1
4	Meja Kerja	1
5	Mesin Mixer Coumpound	2
6	Mesin Pengering	3
7	Mesin Spinning	2
8	Mesin Vacum Trockner Dryne	3
9	Pogmill Machine	3
10	Range Finder (Peralatan Hidrologi)	0
11	Timbangan Elektronik	4
12	Tungku	2
13	TV Monitor	0
14	Wajan Teflon	2
	GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	2
2	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	5
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	4
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6



NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
5	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	9
6	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	3
9	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1
10	Bangunan Menara Pengawas Permanen	5
11	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	8
12	Gedung Garasi/Pool Permanen	1
13	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	23
14	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	1
15	Gedung Pos Jaga Permanen	3
16	Pagar Permanen	8
17	Tugu Pembangunan	3
18	Tugu/tanda batas lainnya	2
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
1	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	3
2	Bangunan Pengambilan Dari Sumber Air	1
3	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	3
4	Instalasi Air Kotor Lain-lain	1
5	Jalan Kabupaten Lain-lain	1
6	Jalan Khusus Lain-lain	2
7	Jaringan Distribusi Lain-lain	2
8	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	16
9	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	1
10	Jaringan Transmisi Lain-lain	4
11	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 3 KVA	1
12	Saluran Drainage	5
13	Sumur Artetis	5
14	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	1
15	Sumur Resapan	6
ASET TETAP LAINNYA		
BAHAN PERPUSTAKAAN		
1	Ensylopedia, Kamus, Buku Referensi	54
2	Buku Umum Lain-lain	16
3	Agama Islam	6
4	Ekonomi	11
5	Hukum	126
6	Perdagangan	4
7	Ilmu Perdagangan Khusus Industri	7

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
	TANAMAN	
1	Tanaman Keras	1436
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		
1	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan (DED Revitalisasi Pasar Sukamandi)	1
2	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan (Jasa Konsultasi Primari Studi Pembangunan Pasar Kuliner Terapung)	1
3	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan (Jasa Konsultasi Perencanaan DED Landscape Pujamas Gantung)	1
4	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan (Review DED Design Gedung Laboratorium Metrologi Legal)	1
5	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan (Review DED Pujasera Gantung)	1
ASET LAINNYA		
	ASET TIDAK BERWUJUD	
1	Software (Sistem Perizinan Terpadu)	1
2	Software (Menejemen Server)	1
3	Software (Aplikasi Informasi Harga + Digital signare)	1

Sumber data : SIMDA Barang Bagian Pengurus dan Penyimpan Barang per 31 Desember 2022

2.3 KINERJA PELAYANAN

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur dibentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur merupakan pemisahan tugas dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur yang mengampu urusan Penanaman modal, perdagangan dan perindustrian menjadi 2 (dua) perangkat daerah yaitu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mengampu urusan penanaman modal dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengampu urusan Perdagangan dan Perindustrian.

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur yang akan dijelaskan dalam Renstra ini adalah kinerja pelayanan Urusan Penanaman Modal tahun 2018, 2019 dan 2020 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur selama periode Renstra perubahan 2016-2021 dan kinerja urusan perdagangan dan perindustrian tahun 2021 dan 2022 untuk Renstra periode 2021-2026 . Berikut Tabel capaian kinerja pelayanan.



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur

NO	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	Indikator Renstra 2016-2021																		
	INDIKATOR PERUBAHAN (Renstra Perubahan)																		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan PTSP (skor)			√	78,2	83	83,5	-	-	78,2	84,57	86,23	-	-	100%	102%	103,27%	-	-
	Pertumbuhan industri Kecil dan Menengah (Persen)		√		1,24	1,28	1,3	-	-	1,24	9,96	5,73	-	-	100%	778%	440,77%	-	-
	Persentase penambahan investor yang merelisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM (persen)			√	-	3,33	4,84	-	-	-	19,7	24,66	-	-	-	592%	509,10%	-	-
	Rata-rata lama proses penyelesaian perizinan (Hari)			√	4,85 hari	4 hari	< 4 hari	-	-	4,85 hari	4	3	-	-	100%	100%	125%	-	-
	INDIKATOR SEBELUM PERUBAHAN (Renstra Sebelum Perubahan)																		
	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			√	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM (IKK)		√		78,2	-	-	-	-	78,2	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Jumlah Penerbitan Izin (IKK)		√		801 SK	-	-	-	-	801 SK	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Lama Proses Perizinan (IKK)		√		< 5 hari	-	-	-	-	< 5 hari	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Terselenggaranya Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha (SPM)	√			100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bid. PM melalui PTSP di Bid. PM berupa Pendaft. PMDN, TDP dan SIUP (SPM)	√			100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-



NO	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPM)	√			100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha			√	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Penyelesaian Izin Lokasi (IKK)		√		100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Pelayanan Pengaduan Masyarakat (IKK)		√		0 kali	-	-	-	-	0 kali	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan			√	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Jumlah kepesertaan promosi penanaman modal baik regional maupun nasional			√	11 kali	-	-	-	-	11 kali	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)			√	8 investor	-	-	-	-	8 investor	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		√		Rp 150.898.690.033	-	-	-	-	Rp 150.898.690.033	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Rasio daya serap tenaga kerja bidang Penanaman Modal			√	159,84 TK	-	-	-	-	159,84 TK	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Persentase kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN			√	-68,09	-	-	-	-	-68,09	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
B	Indikator Renstra 2021-2026																	-	-
	Indeks kepuasan layanan penunjang				-	-	-	65-76,60=C	65-76,60=C	-	-	-	C (74,75)	B (85,33)	-	-	-	97,26	111,40
	Nilai AKIP perangkat daerah				-	-	-	B> 60-70	B > 60-70	-	-	-	B (63,08)	B(71,72)	-	-	-	90,11	102,46
	Rata-rata Tingkat kepatuhan pelayanan				-	-	-	Sedang (51-80)	Sedang (51-80)	-	-	-	Sedang (79,99)	81,50 (Kualitas Tinggi)	-	-	-	99,99	101,88



NO	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi (Persen)				-	-	-	63	65	-	-	-	83,33	100	-	-	-	132,27%	153,85 %
	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM (Persen)				-	-	-	11,16	11,2	-	-	-	53,06	22,67	-	-	-	475,45%	202,41 %

Urusan Penanaman Modal

Capaian kinerja pelayanan urusan Penanaman modal merupakan capaian dari target urusan Penanaman modal yang ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan periode 2016-2021 dan renstra periode 2021-2026. Berikut realisasi capaian target urusan Penanaman modal tahun 2018, 2019, 2020 pada periode renstra periode 2016-2021 dan periode renstra 2021-2022 untuk tahun 2021, 2022.

Capaian Indikator Pada Renstra Perubahan

- **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan PTSP**

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Capaian IKM bidang penanaman modal pada tahun 2018, 2019, dan 2020 dapat dikategorikan mutu pelayanan B dengan kategori pelayanan Baik dengan interval konversi IKM (76,61 – 88,30). Indikator ini dipakai pada Renstra Perubahan maupun pada Renstra sebelum perubahan. Untuk rasio capaian setiap tahun diperoleh nilai 100 persen atau lebih

- **Persentase penambahan investor yang merelisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM**

Indikator ini baru ada di renstra perubahan, sehingga untuk capaian realisasi hanya ada pada tahun 2019 dan 2020. Rasio capaian indikator ini melebihi dari 100 persen, dikarenakan pada saat penetapan target, investor baru yang melaporkan investasinya sangat sedikit.

- **Rata-rata lama proses penyelesaian perizinan**

Indikator ini digunakan pada Renstra Perubahan maupun sebelum perubahan dengan nomenklatur yang sedikit berbeda. Pada periode Renstra sebelum perubahan nomenklatur yang digunakan adalah lamanya proses perizinan. Rata-rata lama proses penyelesaian perizinan merupakan rata-rata lamanya suatu perizinan selesai. Lama proses perizinan adalah dimulai dari berkas pemohon yang diterima oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di bagian pendaftaran sampai dengan terbitnya izin. Lama proses perizinan ini dihitung selama berkas pemohon ada di PTSP. Sedangkan apabila dalam proses terbitnya izin, mengharuskan menggunakan rekomendasi oleh Dinas Teknis, hari dimana berkas pemohon diserahkan ke Dinas teknis tidak dihitung (tidak menjadi hitungan lamanya proses perizinan di PTSP), dan apabila berkas pemohon tersebut diserahkan kembali oleh Dinas teknis ke PTSP, hari (lama berkas di PTSP) dihitung lagi. Rasio capaian indikator ini selama periode Renstra (tahun 2018, 2019 dan 2020) diperoleh nilai sebesar 100 persen.

Capaian indikator pada Renstra sebelum perubahan

Rasio capaian indikator pada renstra sebelum perubahan seluruhnya adalah 100 persen, dikarenakan pada saat penyusunan renstra perubahan, adanya perubahan target indikator. Indikator-indikator tersebut sudah tidak digunakan lagi pada Renstra Perubahan. Indikator- Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur



- Jumlah Penerbitan Izin
- Lama Proses Perizinan
- Terselenggaranya Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha
- Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bid. PM melalui PTSP di Bid. PM berupa Pendaft. PMDN, TDP dan SIUP
- Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
- Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
- Penyelesaian Izin Lokasi
- Pelayanan Pengaduan Masyarakat
- Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan
- Jumlah kepesertaan promosi penanaman modal baik regional maupun nasional
- Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
- Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
- Rasio daya serap tenaga kerja bidang Penanaman Modal
- Persentase kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN

Capaian indikator pada Renstra 2021-2026

- **Indeks kepuasan layanan penunjang**

Indikator ini merupakan indikator urusan penunjang yang ada pada Renstra DPMPTSP tahun 2021-2026. Perolehan capaian indeks kepuasan layanan penunjang tahun 2021 sebesar 74,75 dengan nilai mutu pelayanan C dan rasio capaian sebesar 97,26 persen dan tahun 2022 sebesar 85,33 dengan nilai mutu pelayanan B atau dengan rasio capaian sebesar 111,40 persen.

- **Nilai AKIP perangkat daerah**

Indikator ini merupakan indikator urusan penunjang yang ada pada Renstra DPMPTSP tahun 2021-2026. Perolehan capaian Nilai AKIP perangkat daerah tahun 2021 sebesar 63,08 dengan nilai kategori B dan rasio capaian sebesar 90,11 persen dan tahun 2022 sebesar 71,72 dengan nilai kategori B atau dengan rasio capaian sebesar 102,40 persen.

- **Rata-rata Tingkat kepatuhan pelayanan**

Indikator ini merupakan indikator urusan Penanaman modal yang ada pada Renstra DPMPTSP tahun 2021-2026. Indikator ini merupakan indikator berdasarkan penilaian kepatuhan pelayanan terpadu satu pintu oleh Ombudsman. Perolehan capaian Rata-rata Tingkat kepatuhan pelayanan tahun 2021 sebesar 79,99 dengan nilai kategori sedang dan rasio capaian sebesar 99,99 persen dan tahun 2022 sebesar 81,50 dengan nilai kategori kualitas tinggi atau dengan rasio capaian sebesar 101,88 persen.

- **Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi**

Indikator ini merupakan indikator urusan Penanaman modal yang ada pada Renstra DPMPTSP tahun 2021-2026. Cara perhitungan indikator ini adalah Jumlah data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan

yang sudah terintegrasi (dibagi) jumlah seluruh data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada/ tersedia (dikali) 100 persen. Perolehan capaian tahun 2021 sebesar 83,33 persen dan rasio capaian sebesar 132,27 persen dan tahun 2022 sebesar 100 persen dengan rasio capaian sebesar 153,85 persen.

- **Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM**
Indikator ini merupakan indikator urusan Penanaman modal yang ada pada Renstra DPMPSTPP tahun 2021-2026. Cara perhitungan indikator ini adalah Jumlah investor yang merelisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun n (dikurang) Jumlah investor yang merelisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun n-1 (dibagi) jumlah investor yang merelisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun n-1 (dikali) 100 persen. Perolehan capaian tahun 2021 sebesar 53,06 persen dan tahun 2022 sebesar 22,67 persen dengan rasio capaian pada tahun 2021 dan 2022 diatas 100 persen

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk mendukung tercapainya indikator diperlukan dukungan anggaran. Berikut anggaran yang digunakan untuk melakukan pelayanan dan pencapaian kinerja pada urusan Penanaman modal sampai dengan tahun 2022.

Urusan Penanaman Modal

Tahun 2018 realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 575.471.900,- atau 91,15% dari anggaran yang tersedia.
Tahun 2019 realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 584.935.230,- atau 95,67% dari anggaran yang tersedia.
Tahun 2020 realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 130.983.500,- atau 96,54% dari anggaran yang tersedia.
Tahun 2021 realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 757.652.763,- atau 85,11 % dari anggaran yang tersedia
Tahun 2022 realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 884.227.626,- atau 88,22 % dari anggaran yang tersedia

Urusan Penunjang

Tahun 2018 realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 3.584.425.111 atau 90,98 % dari anggaran yang tersedia.
Tahun 2019 realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 3.167.007.497,- atau 91,90 % dari anggaran yang tersedia.
Tahun 2020 realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 2.861.736.265,- atau 92,79 % dari anggaran yang tersedia.

Urusan penunjang untuk tahun 2021 – 2022 sudah menggunakan program kegiatan berdasarkan Permendagri No. 90 tahun 2019 sehingga anggaran urusan penunjang sudah termasuk anggaran penyediaan gaji ASN, sedangkan anggaran urusan penunjang tahun 2018 – 2020 belum termasuk gaji PNS/ ASN.

Tahun 2021 realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 6.550.660.898,- atau 91,24 % dari anggaran yang tersedia
Tahun 2022 realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 6.093.084.243,- atau 87,72 % dari anggaran yang tersedia

Secara terperinci dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 2.8
Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Urusan Penanaman Modal

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar															
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar															
Urusan Penanaman Modal	631.345.000	611.389.000	135.676.000	890.239.491	1.002.304.800	575.471.900	584.935.230	130.983.500	757.652.763	884.227.626	91,15%	95,67%	96,54%	85,11	88,22
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	45.940.000	237.584.000	10.780.000	0	0	34.698.000	224.971.130	8.416.000	0	0	75,53%	94,69%	78,07%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	561.580.000	355.830.000	96.166.000	0	0	517.323.900	342.389.100	94.891.000	0	0	92,12%	96,22%	98,67%	0,00%	0,00%
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	23.825.000	17.975.000	0	0	0	23.450.000	17.575.000	0	0	0	98,43%	97,77%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Pelayanan Publik	0	0	9.000.000	0	0	0	0	8.998.500	0	0	0,00%	0,00%	99,98%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Standarisasi Administrasi Pelayanan Perizinan	0	0	19.730.000	0	0	0	0	18.678.000	0	0	0,00%	0,00%	94,67%	0,00%	0,00%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0	0	0	95.000.000	41.892.700	0	0	0	59.639.165	40.740.500	0	0	0	62,78%	97,25%
Program Promosi Penanaman Modal	0	0	0	112.735.500	220.391.500	0	0	0	92.808.848	212.524.180	0	0	0	82,32%	96,43%
Program Pelayanan Penanaman Modal	0	0	0	277.379.721	222.619.500	0	0	0	271.468.700	215.263.440	0	0	0	97,87%	96,70%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	0	369.963.500	476.975.500	0	0	0	304.811.550	376.152.506	0	0	0	82,39%	78,86%



Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0	0	0	35.160.770	40.425.600	0	0	0	28.924.500	39.547.000	0	0	0	82,26%	97,83%
C. Urusan Penunjang															
Penunjang Lainnya	3.939.630.000	3.446.301.100	3.083.950.500	7.179.593.503	6.946.122.311	3.584.425.111	3.167.007.497	2.861.736.265	6.550.660.898	6.093.084.243	90,98%	91,90%	92,79%	91,24	87,72
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.764.700.000	2.557.942.500	2.239.846.000	0	0	2.611.970.411	2.326.879.297	2.074.065.535,00	0	0	94,48%	90,97%	92,60%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.144.930.000	868.358.600	764.204.500	0	0	956.954.700	825.128.200	713.820.730,00	0	0	83,58%	95,02%	93,41%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000	20.000.000	5.500.000	0	0	15.500.000	15.000.000	5.500.000,00	0	0	51,67%	75,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	74.400.000	0	0	0	0	68.350.000,00	0	0	0,00%	0,00%	91,87%	0,00%	0,00%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	7.179.593.503	6.946.122.311	0	0	0	6.550.660.898	6.093.084.243	0	0	0	91,24%	87,72%
JUMLAH SELURUH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM/KEGIATAN	13.210.248.500	10.733.520.533	4.003.875.500	8.069.832.994	7.948.427.111	10.365.196.881	9.059.280.426	3.722.305.094	7.308.313.661	6.977.311.869	78,46%	84,40%	92,97%	90,56	87,78



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN

Urusan Penanaman Modal

1. Meningkatkan kepemilikan izin pelaku usaha
2. Menyediakan data dan informasi perizinan dan non perizinan secara terintegrasi
3. Meningkatkan realisasi investasi PMA dan PMDN
4. Membangun kepercayaan kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Belitung Timur.
5. Pengelolaan forum tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) tingkat Kabupaten Belitung Timur

PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Berikut peluang yang ada untuk meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

Urusan Penanaman Modal

1. Dukungan dan Kebijakan Pusat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Dukungan kebijakan pusat yang mewajibkan perusahaan tertentu melaksanakan aktivitas CSR atau tanggungjawab sosial dan lingkungan

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur dalam pasal 2 huruf d, angka 4 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Dalam menjalankan tugas serta fungsi urusan yang terkait dengan Penanaman modal adalah rendahnya nilai realisasi investasi tahunan dan kepemilikan izin usaha yang ada Kabupaten Belitong Timur serta belum optimalnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait regulasi yang sering berubah-ubah. Selanjutnya dalam rangka penilaian kelembagaan pelayanan publik, ukuran yang umum digunakan dalam penilaian pelayanan publik adalah merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah dipetakan ke dalam tabel pemetaan permasalahan pelayanan perangkat daerah, seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya nilai rata-rata kepatuhan standar pelayanan di DPMPTSP	Banyaknya variabel indikator penilaian yang tidak terisi	- Belum terpenuhinya komponen indikator kepatuhan standar pelayanan
2	Banyaknya usaha yang belum memiliki izin	Pelaku usaha/ masyarakat enggan mengurus izin	- Kurangnya pengetahuan masyarakat/ pelaku usaha akan manfaat memiliki izin usaha
		Sistem Pelayanan Perizinan yang sering mengalami Perubahan	- Kurangnya pengetahuan tentang penggunaan sistem aplikasi perizinan
		Proses perizinan terhambat	- Kurangnya sarana dan prasarana untuk pendampingan pengurusan perizinan secara elektronik
3	Masih terdapat izin usaha yang belum efektif	Pelaku usaha tidak melakukan pemenuhan komitmen	- Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam pengurusan izin melalui sistem OSS
		Kurangnya pengetahuan SDM perizinan	- Peraturan perizinan sering mengalami perubahan
4	Belum optimalnya realisasi investasi yang dilaporkan oleh pelaku usaha	Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penyampaian LKPM	- Minimnya tingkat pengendalian PM

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5	Data dan informasi perizinan belum terintegrasi seluruhnya	Kurangnya pengolahan data dan informasi perizinan	- Terbatasnya SDM pengolahan data dan informasi
			- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk mengolah data dan informasi perizinan
6	Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi para investor dalam berinvestasi	Belum adanya peraturan terkait pemberian insentif	- Minat Investor untuk berinvestasi berkurang menyebabkan rendahnya nilai investasi daerah
7	Belum optimalnya koordinasi kemitraan usaha kecil dan menengah dengan investor/ pengusaha besar	Belum terintegrasinya data-data UKM	- Kurangnya komunikasi dan data tentang UKM binaan yang ada di kabupaten Belitung Timur
8	Belum optimalnya kerjasama promosi penanaman modal	Masih rendahnya minat investor khususnya berskala besar untuk berinvestasi	- Kurangnya sinergisitas antara stakeholder untuk melakukan promosi PM

3.2 TELAHAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Belitung Timur. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut ditetapkan beberapa misi, diantaranya:

1. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja;
3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitung Timur dan pengentasan kemiskinan.

Berkaitan dengan Renstra Tahun 2021 – 2026 Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terdapat beberapa hal yang akan dilakukan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Periode 2021-2026

Misi KDH / Program Pembangunan	Pelayanan DPMTSPP	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Misi 1 : Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik		
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, yaitu kesadaran masyarakat untuk memiliki izin dan pemenuhan komitmen perizinan pelaku usaha sangat rendah - Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam pengurusan izin melalui sistem OSS - Sistem Pelayanan Perizinan yang sering mengalami Perubahan	Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik



Misi KDH / Program Pembangunan	Pelayanan DPMPTSP	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		- Kurangnya sarana dan prasarana untuk pendampingan pengurusan perizinan secara elektronik	
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Data dan informasi perizinan belum terintegrasi seluruhnya	Terbatasnya SDM pengolahan data dan informasi	Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
2	Misi 2 : Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja		
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penyediaan fasilitas kemudahan Penanaman Modal yaitu belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi para investor dalam berinvestasi dan koordinasi kemitraan usaha kecil dan menengah dengan investor/ pengusaha besar belum maksimal	Belum adanya peraturan terkait pemberian insentif dan kemudahan berusaha	Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai investasi daerah
Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yaitu belum optimalnya promosi penanaman modal	Belum tersedianya data potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan setiap sektor usaha	Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai investasi daerah
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penyampaian LKPM	Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai investasi daerah
2	Misi 3 : Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitong Timur dan pengentasan kemiskinan		
--	--	--	--

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

URUSAN PENANAMAN MODAL

Renstra urusan penanaman modal berpedoman kepada Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

**BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam
Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi
Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”**

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran renstra BKPM dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Telaahan Renstra DPMPTSP Terhadap Kementerian dan Lembaga

No	Sasaran Kementerian/ Lembaga	Sasaran Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
URUSAN PENANAMAN MODAL DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (BKPM)				
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal;	Meningkatnya Investor yang berinvestasi	-Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penyampaian LKPM	Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai investasi daerah
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal	Meningkatnya Investor yang berinvestasi	Belum tersedianya data potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan setiap sektor usaha	Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai investasi daerah
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	Meningkatnya pelayanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan	- Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam pengurusan izin melalui sistem OSS	Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai investasi daerah
			- Sistem Pelayanan Perizinan yang sering mengalami Perubahan	
			- Kurangnya sarana dan prasarana untuk pendampingan pengurusan perizinan secara elektronik	
			- Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam pengurusan izin melalui sistem OSS	
			Terbatasnya SDM pengolahan data dan informasi	

3.3.2 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah: “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 –2022, yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan pelayanan dan kualitas kesehatan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Urusan Penanaman Modal

Perangkat daerah yang menaungi urusan penanaman modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Untuk mendukung pencapaian misi gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melalui misi ke-1 Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, menuangkan ke dalam sasarannya berupa meningkatnya realisasi investasi. Sasaran ini mengacu pada sasaran adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur yang mampu urusan penanaman modal di Kabupaten Belitung Timur. Melalui misi ke-5 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu, juga mengacu pada sasaran adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur berupa sasaran meningkatnya pelayanan perizinan.

Tabel 3.4
Telaahan Renstra DPMPTSP Terhadap Renstra Provinsi

No	Sasaran Renstra Provinsi	Sasaran Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<u>URUSAN PENANAMAN MODAL DENGAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG</u>				
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu.	Meningkatnya pelayanan perizinan	- Kurangnya sarana prasarana berupa kendaraan khusus pelayanan perizinan untuk verifikasi perizinan ke lapangan	Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

No	Sasaran Renstra Provinsi	Sasaran Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			- Tim teknis masih berada di perangkat daerah teknis masing-masing, - Aplikasi OSS yang masih dalam tahap penyempurnaan oleh pusat namun harus segera dilaksanakan, sehingga kemampuan memfasilitasi dunia usaha untuk menggunakan OSS masih terbatas	
2	Meningkatnya nilai realisasi investasi.	Meningkatnya Investor yang berinvestasi	- Belum adanya data potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan setiap sektor berdasarkan study kelayakan - Minimnya kualitas SDM yang terlatih di bidang pengelolaan informasi - Masih ada perusahaan yang tidak tahu bahwa menyampaikan LKPM adalah kewajiban. - Kurangnya pemahaman perusahaan terkait tata cara pengisian LKPM.	Adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi investasi untuk meningkatkan nilai investasi daerah

3.4 TELAHAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Belitung Timur yang makmur dan mandiri sebagai kabupaten kepulauan dan bahari yang menjadi salah satu destinasi wisata dunia di Indonesia dengan kekuatan dan daya saing yang tangguh berbasis pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dibanding dengan struktur dan pola eksisting maka DPMPTSP dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang. Sehingga rancangan program beserta targetnya dapat disusun sesuai RTRW Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 3.5
Telaahan Renstra DPMPTSP Terhadap Tata Ruang Wilayah

No	RTRW	Pelayanan DPMPTSP	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
URUSAN PENANAMAN MODAL				
1	Kawasan strategis berdasarkan kepentingan ekonomi	Penyediaan fasilitas kemudahan Penanaman Modal yaitu belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi para investor dalam berinvestasi dan koordinasi kemitraan usaha kecil dan menengah dengan investor/ pengusaha besar belum maksimal	Belum adanya peraturan terkait pemberian insentif dan kemudahan berusaha	Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai investasi daerah
2	Kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial budaya	Program yang mendukung : Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Belum tersedianya data potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan setiap sektor usaha	

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah serangkaian Analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (pasal 1 UU No 32/2009 tentang perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup). Pemahaman ini menunjukkan bahwa KLHS merupakan sebuah kajian atau suatu analisis untuk mengetahui sejauh mana daya dukung dan daya tampung wilayah mampu mendukung pengembangan wilayah tersebut seperti ketersediaan air, resiko kebencanaan, dan sebagainya. Berikut indikator Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Belitong Timur yang termasuk dalam urusan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 3.6
Telaahan Terhadap KLHS

No	KLHS	Pelayanan DPMPTSP	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
URUSAN PENANAMAN MODAL				
1	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yaitu belum optimalnya promosi penanaman modal	Belum tersedianya data potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan setiap sektor usaha	Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai investasi daerah
		Program yang mendukung :		
		Program Promosi Penanaman Modal		



3.5 ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis perangkat daerah dapat dilihat dari identifikasi permasalahan berdasarkan bidang-bidang dan mengacu pada isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka Belitong 2021-2026. Isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur adalah sebagai berikut:

Urusan Penanaman Modal :

1. Masih rendahnya nilai rata-rata kepatuhan standar pelayanan di DPMPTSP
2. Belum optimalnya pengembangan kebijakan yang mendukung penanaman modal/ investasi
3. Belum optimalnya kerjasama promosi penanaman modal dan masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah (RPJMD) adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi pemerintah daerah dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang ada pada perangkat daerah secara totalitas akan menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah.

Visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur ditetapkan sama dengan Visi Kepala Daerah periode 2021-2026 : **BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA**. Berdasarkan visi tersebut, Misi yang terkait langsung dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur adalah :

- Misi 1 : Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- Misi 2 : Memberdayakan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja.

Tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur disajikan sebagaimana berikut ini :



Tabel 4.1
Target, Tujuan, dan Sasaran Renstra

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Indeks kepatuhan standar pelayanan publik	NA	53	54	60	67	73	80	80
		Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	NA	65 – 76,60 = C	65 – 76,60 = C	65 – 76,60 = C	65 – 76,60 = C	65 – 76,60 = C	76,61 – 88,30 = B	76,61 – 88,30 = B
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	B (63,89) B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	BB > 70-80	BB > 70-80	BB > 70-80
		Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	NA	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	NA	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,1
		Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	-	63,00 persen	65,00 persen	67,00 persen	69,00 persen	72,00 persen	74,00 persen	74,00 persen
3	Meningkatnya Investasi		Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN) (dalam juta Rupiah)	346.571	359.057	367.382	378.771	390.513	402.814	415..704	415..704



No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatkan investor yang berinvestasi	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	11,11 persen	11,16 persen	11,20 persen	11,40 persen	11,60 persen	11,80 persen	12,00 persen	12,00 persen



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, sedangkan arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 diantaranya adalah :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi		:	Belitung Timur Bangkit dan Berdaya			
Misi I		:	Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik			
	Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah		Melakukan sosialisasi, pembinaan di desa dan penerbitkan izin di lokasi pelayanan	Pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi		Melakukan pemutahiran data dan mengklasifikasikan data berdasarkan jenis perizinan	Penyediaan data informasi yang terintegrasi
Misi II		:	Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja			
	Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
3	Meningkatnya Investasi		Meningkatkan investor yang berinvestasi		Meningkatkan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal
					Meningkatkan jumlah investor melalui promosi investasi dan kerjasama untuk mendukung peluang investasi dengan memberdayakan potensi daerah	Peningkatan promosi dan rencana investasi untuk mendukung peluang investasi dengan mendorong kemitraan penanam modal dengan UMKM
	Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Misi III		:	Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja			
	-----		-----		-----	-----



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dalam Renstra Perubahan Tahun 2021-2026 berasal dari pemecahan Renstra Kegiatan Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur, yang dikelompokkan menjadi :

1. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN URUSAN PADA SETIAP SKPD (RUTIN) TERDIRI DARI :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milim Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG PENANAMAN MODAL

A. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

B. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

C. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal



2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

3. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadikewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- Pelaksanaan Kegiatan Pomosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

E. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

4. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut:



Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026**

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)				Na	65,00 - 76,60 : C	9.245.019.720	65,00 - 76,60 : C	9.610.497.000	65,00 - 76,60 : C	10.527.747.000	65,00 - 76,60 : C	11.264.175.000	76,61 - 88,30 : B	11.681.738.000	76,61 - 88,30 : B	52.329.176.720
		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)				CC >50-60	B >60-70		B >60-70		B >60-70		BB >70-80		BB >70-80		BB >70-80	
			1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	68	70	9.245.019.720	73	9.610.497.000	76	10.527.747.000	79	11.264.175.000	82	11.681.738.000	82	52.329.176.720
			01. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)	100	100	10.000.000	100	15.000.000	100	25.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	95.000.000
			01. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	4	4	10.000.000	0	15.000.000	0	25.000.000	0	20.000.000	0	25.000.000	4	95.000.000
					**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)				4		4		4		4		16	
			01. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)	100	100	5.879.543.000	100	6.467.497.000	100	7.114.247.000	100	7.825.675.000	100	8.608.238.000	100	35.895.200.000



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan (Orang)	42	46	5.879.543.000	0	6.467.497.000	0	7.114.247.000	0	7.825.675.000	0	8.608.238.000	46	35.895.200.000
					**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/ bulan)				36		36		36		36		144	
			01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)	Na	75	112.277.000	77	161.000.000	79	171.000.000	81	181.000.000	83	181.000.000	83	806.277.000
			01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia (Stel)	0	92	36.777.000	0	76.000.000	0	76.000.000	0	76.000.000	0	76.000.000	92	340.777.000
					**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)				1		1		1		1		4	
			01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang)	0	2	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	2	200.000.000
					**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)				2		2		2		2		8	
			01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK (Orang)	1	5	35.500.000	0	45.000.000	0	55.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	0	265.500.000
					**Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)				10		7		7		7		31	



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

**RENSTRA PERUBAHAN
TAHUN 2021-2026**

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			01. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	78	80	679.050.870	82,5	792.000.000	85	857.500.000	87,5	912.500.000	90	967.500.000	90	4.208.550.870
			01. 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)	11	11	24.985.000	0	26.000.000	0	28.000.000	0	28.000.000	0	28.000.000	11	134.985.000
					**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)				12		11		11		11		45	
			01. 06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan (Jenis)	55	55	91.516.000	0	95.000.000	0	100.000.000	0	105.000.000	0	110.000.000	55	501.516.000
					**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)				12		11		11		11		45	
			01. 06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia (Jenis)	44	44	40.088.000	0	44.000.000	0	47.000.000	0	47.000.000	0	47.000.000	44	225.088.000
					**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)				9		9		9		9		36	
			01. 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia (Jenis)	9	9	33.515.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	9	173.515.000
					**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)				12		12		12		12		48	
			01. 06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)	8	8	77.338.870	0	80.000.000	0	85.000.000	0	85.000.000	0	85.000.000	8	412.338.870



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

**RENSTRA PERUBAHAN
TAHUN 2021-2026**

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)				12		12		12		12		48	
			01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Jenis)	2	2	7.380.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	2	37.380.000
					**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)				1		2		2		2		7	
			01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kali)	8	8	4.228.000	0	4.500.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	8	23.728.000
					**Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)				8		8		8		8		32	
			01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan (Kali)	25	42	400.000.000	76	500.000.000	0	550.000.000	0	600.000.000	0	650.000.000	118	2.700.000.000
					**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)				52		57		63		68		240	
			01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	48	50	1.472.750.000	55	950.000.000	60	1.150.000.000	65	730.000.000	70	490.000.000	70	4.792.750.000
			01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia (Unit)	1	1	300.000.000	0	100.000.000	0	650.000.000	0	0	0	100.000.000	1	1.150.000.000



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					**Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)				3		1		0		3		7	
			01. 07. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	0	1	800.000.000	0	350.000.000	0	150.000.000	0	350.000.000	0	0	1	1.650.000.000
					**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)				1		1		1		0		3	
			01. 07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)	19	28	167.750.000	0	300.000.000	0	150.000.000	0	180.000.000	0	190.000.000	28	987.750.000
					**Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)				13		13		15		15		56	
			01. 07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Paket)	1	1	205.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	1	1.005.000.000
					**Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)				1		1		1		1		4	
			01. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	77,22	83	719.401.350	85	755.000.000	88	765.000.000	91	775.000.000	95	785.000.000	95	3.799.401.350
			01. 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang tertangani (Jenis)	4	4	216.120.000	0	225.000.000	0	235.000.000	0	245.000.000	0	255.000.000	4	1.176.120.000



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)				12		12		12		12		48	
			01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi (Jenis)	5	5	126.883.850	0	135.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	5	681.883.850
					**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)				12		12		12		12		48	
			01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor (Orang)	29	29	376.397.500	0	395.000.000	0	390.000.000	0	390.000.000	0	390.000.000	29	1.941.397.500
					**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12		12		12		12		48	
			01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	88	90	371.997.500	92	470.000.000	94	445.000.000	95	820.000.000	97	625.000.000	97	2.731.997.500
			01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Laik Jalan (Unit)	20	20	281.997.500	0	315.000.000	0	315.000.000	0	355.000.000	0	355.000.000	20	1.621.997.500



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)				20		20		20		20		80	
			01. 09. 09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik (Bangunan)	2	4	65.000.000	0	70.000.000	0	65.000.000	0	430.000.000	0	235.000.000	4	865.000.000
					**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)				3		3		3		3		12	
			01. 09. 10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana gedung kantor yang dipelihara (Unit)	10	10	25.000.000	0	85.000.000	0	65.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	10	245.000.000
					Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor yang direhabilitasi (Unit)	Na	0		0		0		0		0		0	0
					**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)				50		10		10		10		80	
	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat kepatuhan pelayanan (Persen)				Na	Sedang (S)	309.520.000	Sedang (S)	303.996.000	Sedang (S)	339.195.800	Sedang (S)	355.155.000	Tinggi (T)	371.913.000	Tinggi (T)	1.679.779.800
			4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu (Persen)	82	83,5	309.520.000	84	303.996.000	84,5	339.195.800	85	355.155.000	86	371.913.000	86	1.699.779.800



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			04. 01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan (Persen)	7	8	309.520.000	9	303.996.000	10	339.195.800	11	355.155.000	12	371.913.000	12	1.679.779.800
			04. 01. 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (Laporan)	2	2	289.520.000	0	303.996.000	0	319.195.800	0	335.155.000	0	351.913.000	2	1.599.779.800
					Laporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan (Laporan)	12	12		0		0		0		0		12	0
					**Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)				175		175		175		175		700	
			04. 01. 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen (Kali)	Na	50	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	50	80.000.000



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					**Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal(kegiatan usaha)				0		5		5		10		20	
Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi (Persen)				Na	65	60.000.000	67	60.000.000	69	60.000.000	72	60.000.000	74	60.000.000	3,95	300.000.000
			6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha (Persen)	54	54,55	60.000.000	63,64	60.000.000	72,73	60.000.000	81,82	60.000.000	100	60.000.000	100	300.000.000
			06. 01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan (Persen)	88	89	60.000.000	90	60.000.000	90,5	60.000.000	91	60.000.000	91,3	60.000.000	91,3	300.000.000
			06. 01. 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Laporan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang telah diolah (Laporan)	12	12	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	12	300.000.000



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				secara Elektronik														
					**Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (dokumen)				12		12		12		12		48	
Meningkatnya investasi	Meningkatkan investor yang berinvestasi	Persentase penambahan investor yang merelisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM (Persen)				11,11	11,2	1.126.431.000	11,4	1.413.618.500	11,6	1.463.618.500	11,8	1.423.618.500	12	1.273.618.500	12	6.700.905.000
			2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan (Persen)	33,33	66,67	60.000.000	66,67	200.000.000	66,67	250.000.000	100	210.000.000	100	60.000.000	100	780.000.000
			02. 01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan (Kebijakan)	Na	2	10.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	3	160.000.000	3	10.000.000	3	530.000.000



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			02. 01. 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penyusunan dokumen kebijakan daerah terkait penanaman modal (Dokumen)		0	10.000.000	0	0	0	200.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	230.000.000
					Sosialisasi dokumen kebijakan Daerah terkait penanaman modal (Kali)		1		0		0		0		0		1	0
					**Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (dokumen)				0		1		1		1		3	
			02. 01. 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang dievaluasi (Dokumen)		0	0	0	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	0	0	300.000.000
					**Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah (kegiatan usaha)				1				1		0		2	
			02. 02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase informasi investasi yang tersedia (Persen)	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	250.000.000
			02. 02. 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen informasi potensi atau peluang usaha (Dokumen)	1	1	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	1	250.000.000



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					**Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (dokumen)				1		1		1		1			
			3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi (Investor)	1	1	530.000.000	2	630.187.500	2	630.187.500	2	630.187.500	2	630.187.500	9	3.050.750.000
			03. 01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sektor usaha yang dipromosikan (sektor)	2	4	530.000.000	4	630.187.500	4	630.187.500	4	630.187.500	4	630.187.500	4	3.050.750.000
			03. 01. 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Fasilitasi kerjasama strategis antar usaha besar dan UKM (UKM)	Na	1	350.000.000	0	130.187.500	0	130.187.500	0	130.187.500	0	130.187.500	1	870.750.000
					Laporan monitoring kerjasama penanaman modal (Laporan)	Na	12		0		0		0		0		12	0
					**Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)				1		1		1		1		4	
			03. 01. 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Promosi peluang penanaman modal/investasi (Kali)	1	2	180.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	2	2.180.000.000



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					**Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (dokumen)				1		2		2		2		7	
			5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya (Investor)	17	18	536.431.000	19	583.431.000	20	583.431.000	21	583.431.000	22	583.431.000	22	2.870.155.000
			05. 01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (Persen)	6,8	7	536.431.000	7,5	583.431.000	8	583.431.000	8,5	583.431.000	9	583.431.000	9	2.870.155.000
			05. 01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kali)		25	128.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	25	688.000.000
					**Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (kegiatan usaha)				10		10		10		10		40	
			05. 01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Moda (Kali)		4	193.431.000	0	218.431.000	0	218.431.000	0	218.431.000	0	218.431.000	4	1.067.155.000
					**Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (kegiatan usaha)				200		200		200		200		800	



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			05. 01. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kali)	12	150	215.000.000	0	225.000.000	0	225.000.000	0	225.000.000	0	225.000.000	150	1.115.000.000
					**Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (kegiatan usaha)				50		50		50		50		200	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatkan Produksi Industri Kecil dan Menengah	Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Sektor Pangan dan Kerajinan (Rupiah)				235960224	64	1.417.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	294.791.408	1.417.500.000
			2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah (Persen)	5,73	5,8	1.317.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.718.000.000
			02. 01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Industri kecil menengah (IKM) yang berkembang/ tumbuh setelah mendapat pelatihan dan pendampingan (Persen)	36,36	7	1.317.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.317.500.000
			02. 01. 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah sentra IKM yang dibina (Sentra)		5	50.000.000	0		0		0		0		5	50.000.000



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (dokumen)				4		4		4		4		16	
			02. 01. 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang disertifikasi (IKM)		95	300.000.000	0		0		0		0		95	300.000.000
					Jumlah SDM IKM yang terlatih (IKM)		40		0		0		0		0		40	0
					**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (dokumen)				0		0		0		0		0	
			02. 01. 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Kelompok IKM yang terfasilitasi sarana prasarana industri (Kelompok)		4	107.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4	107.500.000
					**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (dokumen)				4		4		4		4		16	



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							Tahun 2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			02. 01. 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM Kerajinan yang terfasilitasi pembina kerajinan (IKM Kerajinan)		30	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30	800.000.000		
					Pengadaan sarana prasarana pendukung kerajinan daerah (unit)		3		0		0		0		0		3	0		
					Jumlah IKM non Kerajinan yang difasilitasi		0		0		0		0		0		0	0		
					**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (dokumen)				4		4		4		4		16			
			02. 01. 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan IKM (Laporan)	Na	12	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	60.000.000		
					**Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (dokumen)				0		0		0		0		0			
			4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data informasi Industri di SIINAS (Persen)	50	58,33	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	512.000.000	512.000.000		
			04. 01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang menyampaikan data dan informasi secara lengkap (Persen)	89	90	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90	100.000.000		



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			04.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Laporan informasi data IKM (Laporan)	Na	12	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100.000.000
					**Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (dokumen)				4		4		4		4		16	
TOTAL								12.158.470.720		11.388.111.500		12.390.561.300		13.102.948.500		13.387.269.500		62.427.361.520

Program Inovasi Perangkat Daerah

Sebagai percepatan mewujudkan Belitung Timur Bangkit dan Berdaya diperlukan upaya-upaya yang inovatif dan aksi nyata sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan perekonomian merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya investasi yang dapat membuka peluang berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dan memperluas lapangan kerja. Investasi adalah salah satu indikator yang cukup vital untuk menjadi salah satu penentu kemajuan pembangunan ekonomi suatu daerah, sehingga dengan berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat membantu para investor maupun calon investor untuk berinvestasi di suatu daerah. Selain itu, investasi memiliki hubungan yang positif terhadap pendapatan daerah. Untuk itu kebijakan yang mendukung kemudahan investasi sangat diperlukan, di mana semakin mudah proses investasi masuk ke daerah maka akan semakin banyak pula kegiatan investasi dan semakin tinggi juga pendapatan yang bisa dihasilkan suatu daerah. Selanjutnya investasi juga berpotensi dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dan daya beli masyarakat lokal melalui penyerapan bahan baku dan tenaga kerja dari wilayah sekitar. Dengan demikian, adanya investasi sangat membantu pemerintah daerah dalam memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam RPJMD 2021-2026 dirumuskan 5 (lima) inovasi daerah melalui pendekatan THIS (Tematik Holistik Integratif Spasial) sebagai berikut:

1. Yuk Sekolah
2. Yuk Nyelik Pasien
3. Yuk Ke Ume
4. Lawang Beltim
5. Beltim Terang Benderang

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belitung Timur mendukung inovasi daerah Lawang Beltim. Melalui Lawang Beltim. Lawang Beltim merupakan program inovasi daerah yang dilakukan melalui pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial) sebagai upaya membuat sebuah portal layanan terpadu berbasis elektronik guna memudahkan pelayanan, komunikasi dan pertukaran data dan informasi antar pemangku kepentingan yang cepat, mudah dan transparan. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memiliki kanal informasi resmi Pemerintah Daerah yang menampilkan secara interaktif jurnal informasi pembangunan daerah, mensosialisasikan kebijakan/program Pemerintah Daerah, menyajikan potensi dan keunggulan daerah serta menyediakan media bagi Pemerintah Daerah untuk mendapatkan feedback dari masyarakat dalam rangka upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Layanan elektronik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belitung Timur adalah itu layanan pengurusan perizinan (OSS dan SiCantik) juga terintegrasi di Lawang Beltim. Berikut inovasi yang ada dan akan dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur.



Tabel 6.2
Inovasi Daerah

No	Inovasi	Penggunaan	Keterangan
1	Pengembangan SiCantik	Pengembangan Aplikasi berbasis web yang memproses permohonan Non Berusaha pada DPMPTSP Kab. Beltim	Sudah terlaksana
2	Tanda Tangan Elektronik (e-Signature)	Digunakan untuk perizinan	Sudah terlaksana
3	Sistem e-CSR	Menampilkan data CSR yang ada di Kab. Beltim	Akan dilaksanakan tahun 2023

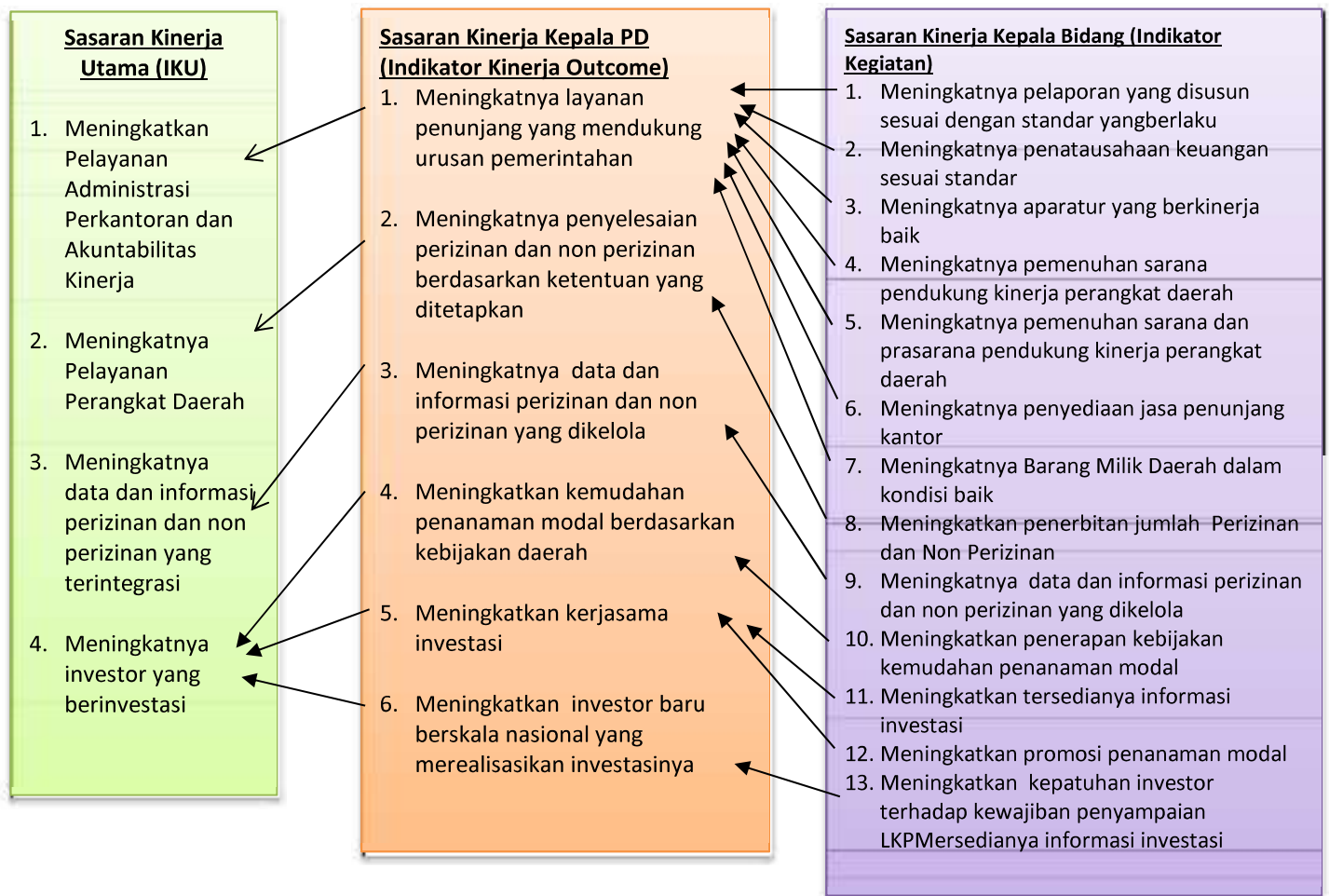
BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Selain itu, Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post). Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Belitung Timur 2021-2026, berikut gambaran sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur

Gambar 7.1

Sasaran Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu





Berikut indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja awal periode RPJMD Tahun 2020	Target						Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	Na	65 – 76,60 = C	65 – 76,60 = C	65 – 76,60 = C	65 – 76,60 = C	65 – 76,60 = C	76,61 – 88,30 = B	76,61 – 88,30 = B
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	B (63,89) B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	BB > 70-80	BB > 70-80	BB > 70-80
3	Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Nilai	Na	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	tinggi	tinggi
4	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	persen	Na	63,00	65,00	67,00	69,00	72,00	74,00	74
5	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	persen	11,11	11,16	11,20	11,40	11,60	11,80	12,00	12,00

Untuk memudahkan dalam pencapaian kinerja akhir, berikut definisi operasional dari kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 7.2
Defenisi Operasional Indikator Kinerja DPMPTSP

No	Indikator Kinerja Utama / Outcome	Defenisi Operasional	Rumusan Perhitungan		
INDIKATOR KINERJA UTAMA DPMPTSP					
1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Indeks kepuasan layanan penunjang dihitung melalui survei kepuasan terhadap pengguna layanan sekretariat (terkait pelayanan subbag keuangan, subbag umum dan kepegawaian dan subbag perencanaan evaluasi dan pelaporan) dalam melayani tugas dan fungsi di			
			Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja
			25,00-64,99	D	Tidak Baik
			65,00-76,60	C	Kurang Baik



No	Indikator Kinerja Utama / Outcome	Defenisi Operasional	Rumusan Perhitungan																																																																										
		bidang-bidang berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017	76,61-88,30	B	Baik																																																																								
			88,31-100,00	A	Sangat Baik																																																																								
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat pada tahun berkenaan	<table><tr><th>Nilai</th><th>Kategori</th></tr><tr><td>0 - 30</td><td>D</td></tr><tr><td>30-50</td><td>C</td></tr><tr><td>50 - 60</td><td>CC</td></tr><tr><td>60 - 70</td><td>B</td></tr><tr><td>70 - 80</td><td>BB</td></tr><tr><td>80 - 90</td><td>A</td></tr><tr><td>90 - 100</td><td>AA</td></tr></table>				Nilai	Kategori	0 - 30	D	30-50	C	50 - 60	CC	60 - 70	B	70 - 80	BB	80 - 90	A	90 - 100	AA																																																							
Nilai	Kategori																																																																												
0 - 30	D																																																																												
30-50	C																																																																												
50 - 60	CC																																																																												
60 - 70	B																																																																												
70 - 80	BB																																																																												
80 - 90	A																																																																												
90 - 100	AA																																																																												
3	Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Kepatuhan adalah ketaatan Penyelenggara Pelayanan Publik dalam memenuhi Standar Pelayanan Publik yang efektif dan efisien. Kepatuhan pelayanan publik berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	<table><tr><td colspan="3">Tingkat kepatuhan dari rata-rata nilai kepatuhan pelayanan yang ada di urusan penanaman modal</td></tr><tr><th>Nilai</th><th>Tingkat Kepatuhan</th><th>Zona</th></tr><tr><td>0 - 50</td><td>Rendah</td><td>Merah</td></tr><tr><td>51 - 80</td><td>Sedang</td><td>Kuning</td></tr><tr><td>81 - 100</td><td>Tinggi</td><td>Hijau</td></tr></table> <table><tr><th>No</th><th>Variabel Penilaian</th><th>Komponen Indikator</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1</td><td>Standar Pelayanan</td><td>Persyaratan</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Sistem mekanisme dan prosedur</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Produk pelayanan</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Jangka waktu penyelesaian</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td>laya/ tarif</td><td>12</td></tr><tr><td>2</td><td>Maklumat :Layanan</td><td>Ketersediaan maklumat pelayanan</td><td>12</td></tr><tr><td>3</td><td>Sistem Informasi Pelayanan Publik</td><td>Ketersediaan informasi pelayanan publik elektronik atau non elektronik (booklet, pamflet, website, monitor televisi,dll)</td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td>Sarana dan Prasarana Fasilitas</td><td>Ketersediaan runag tunggu,</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan</td><td>3</td></tr><tr><td>5</td><td>Pelayanan Khusus</td><td>Ketersediaan sarana khusus pengukuran kepuasna pelanggan)</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ketersediaan sarana khusus (ram, rambatan, kursi roda, jalur pemandu, toilet khusus, ruang menyusui, dll)</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna lavanan berkebutuhan</td><td>2</td></tr></table>				Tingkat kepatuhan dari rata-rata nilai kepatuhan pelayanan yang ada di urusan penanaman modal			Nilai	Tingkat Kepatuhan	Zona	0 - 50	Rendah	Merah	51 - 80	Sedang	Kuning	81 - 100	Tinggi	Hijau	No	Variabel Penilaian	Komponen Indikator	Bobot	1	Standar Pelayanan	Persyaratan	6			Sistem mekanisme dan prosedur	6			Produk pelayanan	6			Jangka waktu penyelesaian	12			laya/ tarif	12	2	Maklumat :Layanan	Ketersediaan maklumat pelayanan	12	3	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Ketersediaan informasi pelayanan publik elektronik atau non elektronik (booklet, pamflet, website, monitor televisi,dll)	12	4	Sarana dan Prasarana Fasilitas	Ketersediaan runag tunggu,	3			Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan	2			Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan	3	5	Pelayanan Khusus	Ketersediaan sarana khusus pengukuran kepuasna pelanggan)	3			Ketersediaan sarana khusus (ram, rambatan, kursi roda, jalur pemandu, toilet khusus, ruang menyusui, dll)	2			Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna lavanan berkebutuhan	2
Tingkat kepatuhan dari rata-rata nilai kepatuhan pelayanan yang ada di urusan penanaman modal																																																																													
Nilai	Tingkat Kepatuhan	Zona																																																																											
0 - 50	Rendah	Merah																																																																											
51 - 80	Sedang	Kuning																																																																											
81 - 100	Tinggi	Hijau																																																																											
No	Variabel Penilaian	Komponen Indikator	Bobot																																																																										
1	Standar Pelayanan	Persyaratan	6																																																																										
		Sistem mekanisme dan prosedur	6																																																																										
		Produk pelayanan	6																																																																										
		Jangka waktu penyelesaian	12																																																																										
		laya/ tarif	12																																																																										
2	Maklumat :Layanan	Ketersediaan maklumat pelayanan	12																																																																										
3	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Ketersediaan informasi pelayanan publik elektronik atau non elektronik (booklet, pamflet, website, monitor televisi,dll)	12																																																																										
4	Sarana dan Prasarana Fasilitas	Ketersediaan runag tunggu,	3																																																																										
		Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan	2																																																																										
		Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan	3																																																																										
5	Pelayanan Khusus	Ketersediaan sarana khusus pengukuran kepuasna pelanggan)	3																																																																										
		Ketersediaan sarana khusus (ram, rambatan, kursi roda, jalur pemandu, toilet khusus, ruang menyusui, dll)	2																																																																										
		Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna lavanan berkebutuhan	2																																																																										



No	Indikator Kinerja Utama / Outcome	Defenisi Operasional	Rumusan Perhitungan			
					husus	
			6	Pengelolaan Pengaduan	Ketersediaan sarana pengaduan (SMS, telepon, fax/ email)	35
					Ketersediaan informasi prosedur dan tatacara	3
					Ketersediaan pejabat/ petugas pengelola pengaduan.	2
			7	Penilaian Kinerja	Ketersediaan visi dan misi Pelayanan	
					Ketersediaan visi dan misi Pelayanan	2
			9	Atribut	Ketersediaan petugas penye;enggaraan PTSP	2,5
4	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Data dan informasi yang digunakan adalah seluruh data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan Terintegrasi adalah sudah diintegrasikan dalam informasi website DPMPTSP	Jumlah data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah terintegrasi (dibagi) jumlah seluruh data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada/ tersedia (dikali) 100 persen			
5	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	Jumlah penambahan Investor baru yang melaporkan realisasi investasinya (LKPM)	Jumlah investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun n (dikurang) Jumlah investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun n-1 (dibagi) jumlah investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun n-1 (dikali) 100 persen			
INDIKATOR OUTCOME (PROGRAM)						
1	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	Tepat waktu adalah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.	Jumlah izin tepat waktu yang diterbitkan dalam 1 tahun : (dibagi) Jumlah seluruh izin yang diterbitkan x 100			
2	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha		Jumlah data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal yang dikelola (dibagi) data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal yang seharusnya ada (dikali) 100 persen			
3	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan		Jumlah fasilitasi/insentif kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan (dibagi) Jumlah fasilitasi/insentif kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang harus ada berdasarkan ketentuan (dikali) 100 persen			
4	Investor baru yang berinvestasi	Investor baru merupakan investor/penanam modal/pelaku usaha yang telah disetujui izin usahanya dan berencana menanamkan modal usahanya dengan dengan nilai izin investasi/modal usaha minimal >= Rp 1 milyar	Jumlah investor/pelaku usaha yang merencanakan investasinya dengan nilai investasi/ modal usaha minimal >= Rp 1 Milyar Rupiah pada tahun berkenaan			
5	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya		Jumlah Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya pada tahun berkenaan			
6	Cakupan layanan penunjang		Penjumlahan rata-rata persentase usulan			



No	Indikator Kinerja Utama / Outcome	Defenisi Operasional	Rumusan Perhitungan
	yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		kebutuhan layanan penunjang (rutin) yang terpenuhi di 6 bidang/bagian (dibagi) 6 ** jumlah usulan kebutuhan layanan pendukung operasioanal (rutin) yang terpenuhi (dibagi) jumlah usulan kebutuhan layanan pendukung operasional yang diusulkan (dikali) 100
INDIKATOR KEGIATAN			
1	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)	Yang termasuk laporan kinerja: 1. Laporan kinerja OPD 2. Laporan Data LKPI Bupati 3. LPPD 4. Data Lakip Pemda 5. Laporan Monev Renja Sesuai standar adalah sesuai drngan peraturan/ketentuan yang berlaku	Jumlah laporan kinerja yang disusun dan dilaporkan sesuai standar dalam 1 tahun (dibagi) Jumlah laporan kinerja dalam 1 tahun (5 laporan) (dikali) 100 persen
2	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)	Tata Usaha Keuangan adalah tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual di bidang keuangan. Penatausahaan keuangan yang dimaksud adalah pelaksanaan penatausahaan keuangan yang dilakukan pada perangkat daerah. Pelaksanan penatausahaan keuangan yang ada pada perangkat daerah meliputi: 1. Penatausahaan tatacara pembayaran pembayaran SPJ melalui Ganti Uang 2. Penatausahaan tatacara pembayaran SPJ melalui LS 3. Penatausahaan tatacara penyampaian laporan Pertanggungjawaban SPJ Fungsional dan Administratif 4. Penatausahaan pengelolaan penerimaan retribusi	Jumlah penatausahaan keuangan yang dikelola sesuai standar (dibagi) Jumlah seluruh penatausahaan keuangan yang harus dikelola OPD berdasarkan ketentuan yang berlaku



No	Indikator Kinerja Utama / Outcome	Defenisi Operasional	Rumusan Perhitungan																								
3	Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)	Berkinerja baik diacapai apabila kinerja yang ditetapkan dalam dok perjanjian kinerja (PK) / SKP pada periode perhitungan tercapai dengan nilai baik. Asumsi baik apabila nilai yang diperoleh minimal 76% dengan interpretasi kinerja tinggi. <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Nilai</th><th>Interprestasi</th><th>Kode</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>91% ≤</td><td>Sangat Tinggi</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>76% ≤</td><td>Tinggi</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>66% ≤</td><td>Sedang</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>51% ≤</td><td>Rendah</td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>≤ 50%</td><td>Sangat Rendah</td><td></td></tr> </tbody> </table>	No	Nilai	Interprestasi	Kode	1	91% ≤	Sangat Tinggi		2	76% ≤	Tinggi		3	66% ≤	Sedang		4	51% ≤	Rendah		5	≤ 50%	Sangat Rendah		Jumlah pegawai yang capaian kinerjanya baik (dibagi) jumlah seluruh pegawai yang ada (dikali) 100 persen
No	Nilai	Interprestasi	Kode																								
1	91% ≤	Sangat Tinggi																									
2	76% ≤	Tinggi																									
3	66% ≤	Sedang																									
4	51% ≤	Rendah																									
5	≤ 50%	Sangat Rendah																									
4	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	Pemenuhan sarana pendukung 6 bagian DPMPTSP. Sarana pendukung berdasarkan nota dinas permintaan pendukung operasional pelaksanaan tupoksi (ATK, Fotocopy/cetak, peralatan/perlengkapan kebersihan, keperluan rapat dan koordinasi). 6 bagian terdiri dari Subbag Keuangan, Subbag Umum dan kepegawaian, Subbag Perencanaan, Bid Promosi, Bid Pengendalian, Bid Pelayanan Perizinan,	Jumlah persentase pemenuhan sarana pendukung di 6 bagian Di OPD (dibagi) 6(dikali) 100 persen *** persentase pemenuhan sarana pendukung per bagian = Jumlah permintaan yang dipenuhi (dibagi) jumlah seluruh permintaan (dikali) 100 persen																								
5	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	Sarana dan Prasarana Pendukung kinerja terkait pemenuhan fasilitas gedung kantor/tempat kerja dan sarpras pendukung operasional kinerja/tupoksi yang bersifat belanja modal Perhitungan berdasarkan pemenuhan permohonan nota dinas 9 bagian terdiri dari Subbag Keuangan, Subbag Umum dan kepegawaian, Subbag Perencanaan, Bid Promosi, Bid Pengendalian, Bid Pelayanan Perizinan	Jumlah persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung di 6 bagian Di OPD (dibagi) 6 (dikali) 100 persen *** persentase pemenuhan sarana dan prasarana per bagian = Jumlah permintaan yang dipenuhi (dibagi) jumlah seluruh permintaan (dikali) 100 persen																								
6	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	Jasa Penunjang : 1. Terlayani jasa surat menyurat 2. Tersedia listrik, air dan internet 3. Tersedia tenaga pendukung jasa administrasi, kebersihan, keamanan, supir	Jumlah persentase tersedianya jasa penunjang kantor di 9 bagian di OPD (dibagi) 6 (dikali) 100 persen *** persentase tersedianya jasa penunjang per																								



No	Indikator Kinerja Utama / Outcome	Defenisi Operasional	Rumusan Perhitungan
		Perhitungan berdasarkan pemenuhan jasa penunjang di 6 bagian terdiri dari Subbag Keuangan, Subbag Umum dan kepegawaian, Subbag Perencanaan, Bid Promosi, Bid Pengendalian, Bid Pelayanan Perizinan,	bagian = Jumlah permintaan yang dipenuhi (dibagi) jumlah seluruh permintaan (dikali) 100 persen
7	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	Barang Milik Daerah yang dikelola DPMPTSP	Jumlah barang dalam kondisi baik (dibagi) jumlah seluruh barang yang ada. (dikali) 100 persen
8	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan (Persen)		Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tahun n (dikurang) jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tahun n-1 (dibagi) jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tahun n-1 (dikali) 100 persen
9	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan (Persen)	Ketersediaan data merupakan terpenuhinya/ tersedianya data yang diminta oleh user	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi (dibagi)Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima (dikali) 100 persen
10	Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan (Kebijakan)		Jumlah kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha di bidang penanaman modal yang telah disusun
11	Persentase informasi investasi yang tersedia (Persen)		Jumlah jenis data informasi investasi yang ada (dibagi) Jumlah jenis data informasi investasi yang harus ada (dikali) 100 persen
12	Cakupan sektor usaha yang dipromosikan (sektor)		Jumlah jenis/sektor usaha investasi yang difasilitasi untuk dipromosikan
13	Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) 9,mk, nk (Persen)	Investor yang wajib melaporkan LKPM adalah pelaku usaha yang memiliki modal investasinya lebih dari Rp 50.000.000,-	Jumlah Investor yang menyampaikan LKPM pada tahun n (dibagi) jumlah investor yang wajib LKPM (dikali) 100 persen

PENUTUP

Rencana strategis Perubahan ini adalah dokumen perencanaan perubahan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur menjadi 2 (dua) perangkat daerah yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur yang mengampu urusan penanaman modal dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengampu urusan perdagangan dan perindustrian yang berlaku untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Belitung Timur yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 – 2026.

Sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam renstra perubahan ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategi K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Belitung Timur.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur. Karena itu, renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Solusi yang Paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal dan atau target kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dijabarkan dan Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan Kinerja (LKJIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Laporan Kinerja (LKJIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masa yang akan datang.

Manggar, September 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dan Perdagangan
Kabupaten Belitung Timur,



HARLI AGUSTA, ST
NIP. 19750821 200212 1 005

PEMETAAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
Dokumen Rencana Strategis Perubahan DPMPTSP 2021-2026

Nama PD : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Urusan / Kode : Penanaman Modal / 18
 Bidang Urusan/Kode : Penanaman Modal / 18

SEBELUM PEMUTAKHIRAN									SESUDAH PEMUTAKHIRAN (Kepmendagri 1317 Tahun 2023)			
Kode Program	Program	Hasil Program/Outcome (indikator Program)	Kode Kegiatan	Kegiatan	Keluaran Kegiatan/Output (Indikator Kegiatan)	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan (Indikator Sub Kegiatan)	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan (indikator Sub Kegiatan)	Keterangan
5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13	14
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	01. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)	01. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2.18.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	
			01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)	01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/ bulan)	2.18.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/ bulan)	
			01. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)	01. 05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	2.18.01.2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	
						01. 05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	2.18.01.2.05. 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	
						01. 05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	2.18.01.2.05. 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	
			01. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	01. 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	2.18.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	

SEBELUM PEMUTAKHIRAN									SESUDAH PEMUTAKHIRAN (Kepmendagri 1317 Tahun 2023)			
Kode Program	Program	Hasil Program/Outcome (indikator Program)	Kode Kegiatan	Kegiatan	Keluaran Kegiatan/Output (Indikator Kegiatan)	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan (Indikator Sub Kegiatan)	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan (indikator Sub Kegiatan)	Keterangan
5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13	14
						01. 06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	
						01. 06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	
						01. 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	
						01. 06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	
						01. 06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	
						01. 06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	
						01. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	
			01. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	01. 07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	
						01. 07. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	

SEBELUM PEMUTAKHIRAN									SESUDAH PEMUTAKHIRAN (Kepmendagri 1317 Tahun 2023)			
Kode Program	Program	Hasil Program/Outcome (indikator Program)	Kode Kegiatan	Kegiatan	Keluaran Kegiatan/Output (Indikator Kegiatan)	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan (Indikator Sub Kegiatan)	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan (indikator Sub Kegiatan)	Keterangan
5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13	14
						01. 07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	
						01. 07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	
			01. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	01. 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	
						01. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	
						01. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	
			01. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	01. 09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	
						01. 09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	

SEBELUM PEMUTAKHIRAN									SESUDAH PEMUTAKHIRAN (Kepmendagri 1317 Tahun 2023)			
Kode Program	Program	Hasil Program/Outcome (indikator Program)	Kode Kegiatan	Kegiatan	Keluaran Kegiatan/Output (Indikator Kegiatan)	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan (Indikator Sub Kegiatan)	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan (indikator Sub Kegiatan)	Keterangan
5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13	14
						01. 09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	
04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu (Persen)	04. 01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan (Persen)	04. 01. 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	Ada menjadi Tidak ada dan diusulakn sub kegiatan pemutakhiran
					Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	04. 01. 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal(kegiatan usaha)	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (kegiatan usaha)	Ada menjadi Tidak ada dan diusulakn sub kegiatan pemutakhiran
06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha (Persen)	06. 01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan (Persen)	06. 01. 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (dokumen)	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Ada menjadi Tidak ada dan diusulakn sub kegiatan pemutakhiran

SEBELUM PEMUTAKHIRAN									SESUDAH PEMUTAKHIRAN (Kepmendagri 1317 Tahun 2023)			
Kode Program	Program	Hasil Program/Outcome (indikator Program)	Kode Kegiatan	Kegiatan	Keluaran Kegiatan/Output (Indikator Kegiatan)	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan (Indikator Sub Kegiatan)	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan (indikator Sub Kegiatan)	Keterangan
5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13	14
02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan (Persen)	02. 01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan (Kebijakan)	02. 01. 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (dokumen)	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (dokumen)	
						02. 01. 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah (kegiatan usaha)	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (dokumen)	Ada menjadi Tidak ada dan diusulkn sub kegiatan pemutakhiran
			02. 02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase informasi investasi yang tersedia (Persen)	02. 02. 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (dokumen)	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (daerah)	Ada menjadi Tidak ada dan diusulkn sub kegiatan pemutakhiran
03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi (Investor)	03. 01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sektor usaha yang dipromosikan (sektor)	03. 01. 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (dokumen)	Ada menjadi Tidak ada dan diusulkn sub kegiatan pemutakhiran
						03. 01. 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (dokumen)	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (dokumen)	
05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya (Investor)	05. 01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (Persen)	05. 01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (kegiatan usaha)	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya (kegiatan usaha)	Ada menjadi Tidak ada dan diusulkn sub kegiatan pemutakhiran

SEBELUM PEMUTAKHIRAN									SESUDAH PEMUTAKHIRAN (Kepmendagri 1317 Tahun 2023)			
Kode Program	Program	Hasil Program/Outcome (indikator Program)	Kode Kegiatan	Kegiatan	Keluaran Kegiatan/Output (Indikator Kegiatan)	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan (Indikator Sub Kegiatan)	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan (indikator Sub Kegiatan)	Keterangan
5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13	14
						05. 01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (kegiatan usaha)	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (kegiatan usaha)	Ada menjadi Tidak ada dan diusulakn sub kegiatan pemutakhiran
						05. 01. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (kegiatan usaha)	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan (kegiatan usaha)	Ada menjadi Tidak ada dan diusulakn sub kegiatan pemutakhiran